

Sisi Terang dan Warisan Daendels

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

Oleh : Heri Priyatmoko

media ampuh bagi pemerintah kolonial untuk mengisi kas negara yang relatif kosong karena fokus pada membenahan birokrasi dan ada permasalahan dalam kegiatan ekspor.

Daendels juga menghapus kebijakan pengiriman paksa kapas dan nila. Menghapus monopoli dan subsidi gula, mempertahankan merica sebagai pengiriman paksa, membudidayakan dan memperluas budidaya kopi, dan tetap mempertahankan ekspor beras sebagai kebijakan monopoli pemerintah. Di bawah kepemimpinan Daendels yang dikenal bertangan besi, sistem kuota dan sumbangan paksa untuk pertama kalinya memperoleh angin segar, namun pada dasarnya sistem yang dijalankan terasa sama saja.

Parakitri. T. Simbolon dalam buku Menjadi Indonesia (2006) mengungkap, tanpa malu-malu Daendels meminta uang secara paksa dari berbagai pihak dengan menyebutnya pinjaman (leningen), kendati masyarakat lebih melihatnya sebagai pinjaman paksa (geforceerde leningen). Ironisnya, sebagian besar hasil memalak tersebut justru dijadikan modal Daendels untuk membangun real estate miliknya sendiri. Ia membeli lahan kosong di Buitenzorg (Bogor) dan mendirikan istana megah (Istana Bogor) untuk selanjutnya dijual kepada penggantinya. Ia mengantongi keuntungan sekitar f 900.000.

Sementara itu, kebijakan lainnya yang diterapkan Daendels sangat membebani keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Padahal, pemasukan pemerintah tersendat karena hasil produksi sudah menumpuk dan tidak dapat dijual berkat blokade Inggris, walau pada akhirnya hasil produksi ini dijual ke para pedagang bangsa Eropa dan kapal Amerika. ***

Heri Priyatmoko,
Dosen Sejarah, Fakultas Sastra,
Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta

Belanda, baik secara ekonomi maupun politik. Meluasnya aktivitas perdagangan VOC di Asia juga mendorong kongsi dagang ini memantapkan monopoli atas hasil bumi tertentu untuk pasar Asia. Pada saat memperoleh kekuasaan melalui politik adu domba, VOC mulai memungut pajak dalam bentuk barang. Pajak tersebut berupa jatah beras yang diminta dari para bupati di wilayah pesisir. Perbedaan formal antara kuota pajak (pajak, upeti) dan sumbangan paksa (hasil monopoli), yaitu sumbangan paksa dibayarkan untuk memperoleh sesuatu, sedangkan kuota pajak tidak. Akan tetapi, garis pemisah ini dalam prakteknya sering agak kabur. Selepas VOC mengalami kebangkrutan pada penghujung abad XVIII, disusul peralihan kekuasaan Belanda ke Prancis seperti yang dijelaskan di atas, maka tanah Hindia Belanda dipegang oleh Daendels yang memangku jabatan sebagai gubernur jenderal.

Sesungguhnya, Daendels adalah seorang revolusioner yang menjadi peletak dasar sistem pajak bumi (pajak hasil tanah) atau landrente, bukan Thomas Raffles sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Hal itu terlihat sejak dimulainya kebijakan Daendels yang membatalkan kewajiban para bupati dan pejabat pribumi dari uang bakti. Di hadapan para bupati, Daendels mengumumkan tentang penghentian semua penyeteroran hasil bumi dan menggantinya dengan pajak, upeti, cukai, dan biaya pengakuan. Selanjutnya, penyeteroran hasil bumi seperti beras, kacang, gula, minyak, nila, lada, buah-buahan, kain katun, garam, dan lilin dihapuskan. Kendati demikian, di beberapa wilayah tertentu, penyeteroran beras, kacang, minyak, kayu, dan lada masih tetap dipertahankan. Uang ditetapkan sebagai alat pembayaran

pajak yang sah. Semisal, beras seberat 125 pon diganti uang sejumlah satu ringgit, dan 125 pon kacang diganti dengan 4 ringgit. Untuk komoditas tertentu seperti kopi dan katun diterapkan dan ditetapkan secara paksa, contohnya 3 dolar untuk 128 pon katun atau 4 ringgit untuk menggantikan kopi yang 228 pon, selain itu, ganti rugi 2 dolar ditetapkan untuk setiap 2000 roed sawah.

Seluruh bupati berkewajiban menyetorkan uang pengakuan. Para bupati yang memerintah di Ujung Timur Jawa, seperti Bupati Puger harus menyerahkan uang pengakuan sebesar 500 dolar per-tahunnya, Bupati Pasuruan terkena insentif 2000 dolar setahunnya. Besar kecilnya iuran pengakuan sangat ditentukan oleh luas sempitnya wilayah kabupaten dan subur tidaknya tanah. Prefektur Tegal menyerahkan uang pengakuan sejumlah 101.741 dolar yang dihimpun dari Bupati Tegal I, Tegal II, dan Brebes. Selama tahun 1808, pemerintahan Daendels berhasil menghimpun uang pengakuan dari Ujung Timur dan Pantai Timur Laut Jawa sebesar 217.648,44 dolar (Djoko Marihandono, 2005).

Adapun jenis pajak lainnya yang dapat ditemukan pada periode Daendels meliputi: (1) pajak tanah; (2) pajak pacumpleng atau pajak atas pintu; (3) pajak lerog-aji atau pajak perorangan; (4) pajak pengawang-awang atau pajak pekarangan; (5) pajak pajigar atau pajak atas jumlah kerbau, sapi, dan kuda; (6) pajak wilah welit atau pajak sawah per-jung pertahun f 2,50; (7) pajak pajungket atau pajak atas pindah rumah; (8) pajak bakti atau uang pajak untuk menerima tanah jabatan. Pajak tersebut telah menjadi salah satu tumpuan utama pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi tanah jajahan. Pajak yang diterapkan Daendels menjadi

HATI riang setelah mendengar kabar baik dari kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY beberapa waktu yang lalu. Mereka menemukan lembaran naskah berusia ratusan tahun. Naskah tersebut merupakan kumpulan surat dari Gubernur Hindia Belanda Willem Daendels untuk Sultan Hamengku Buwono II. Menurut pegawai BPAD DIY dalam lembaran surat berbahasa Belanda itu terdapat keterangan tahun 1881. Arsip laksana harta karun, begitu berharga untuk pengayaan pengetahuan dan memahami sejarah kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau.

Periode Daendels relatif pendek dalam rentang panjang sejarah kolonialisme di Nuswantara. Hanya tiga tahun bercokol di Hindia Belanda (1808-1811), namun bukan berarti tidak mempunyai kisah dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pribumi. Fakta penting yang perlu dikabarkan ke publik bahwa Daendels adalah pengagas sistem pajak, bukan Thomas Raffles sebagaimana yang diajarkan di bangku sekolah sampai sekarang ini.

Fakta sejarah bahwa tujuan kedatangan para pedagang Belanda pada era 1600-an ialah mencari hasil pertanian, terutama rempah-rempah yang rasa dan kehangatannya termasyhur di daratan Eropa. Butuh perjuangan keras dan waktu panjang bagi para petualang untuk sampai ke Nusantara.

Seperti apa yang diuraikan Peter Boomgaard (2004) bahwa VOC menerapkan strategi 'worteltongkat?' (janji-janji mulut disertai ancaman) guna menguasai Hindia